



BADAN PUSAT STATISTIK KEPULAUAN SELAYAR

UPAYA DAN STRATEGI BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DATA

Permasalahan: Ukuran Kualitas Data

- ➔ Ketika berbicara mengenai meningkatkan kualitas data, terlebih dahulu tentu kita harus punya rumusan mengenai ukuran-ukuran kualitas data. Tanpa ukuran kualitas data yang jelas, upaya peningkatan kualitas data tidak akan memiliki patokan yang jelas. Sayangnya BPS sendiri sepertinya belum menetapkan ukuran-ukuran kualitas data tersebut secara eksplisit. Meskipun kami meyakini bahwa BPS RI sudah menetapkan ukuran-ukuran kualitas tertentu ketika merancang suatu sensus atau survey dengan pelatihan dan pengawasan yang berjenjang dan berlapis-lapis.
- ➔ Maka, untuk meningkatkan kualitas data, sebagai rujukan, mari kita lihat penetapan standar kualitas data dari BPS-nya Australia. Yaitu Australia Bureau of Statistics (ABS) Data Quality Framework.



ABS Data Quality Framework



Dimensi Kualitas Data



Ada 7 (tujuh) dimensi pada gambar di slide sebelumnya yang digunakan untuk mengukur kualitas data oleh ABS, yaitu: **institutional environment, relevance, timeliness, accuracy, coherence, interpretability,** dan **accessibility**. ABS menyarankan kepada lembaga produsen statistik seperti BPS untuk mempertimbangkan ketujuh dimensi tersebut pada saat merancang, melaksanakan, dan mengolah data survei atau sensus.



Jalan keluar yang komprehensif dan integratif agar permasalahan di setiap tahap kegiatan statistik dapat mencapai kualitas data yang semakin meningkat adalah dengan menerapkan ABS Data Quality Framework pada setiap tahapan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi statistik.



1. Institutional Environment

- 1. Impartiality and Objectivity:** apakah proses pengumpulan dan publikasi data benar-benar dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
- 2. Professional Independence:** sejauh mana lembaga statistik benar-benar merilis data yang independen, bebas dari pengaruh (pesanan) pihak lain; misalnya pemerintah pusat/daerah, departemen atau lembaga negara lainnya, ataupun sektor perusahaan swasta, dan lainnya.
- 3. Mandate for Data Collection:** adanya peraturan perundangan yang dapat mengharuskan responden untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh lembaga statistik (BPS). Baik responden tersebut merupakan perorangan, perusahaan, ataupun lembaga pemerintah. Peraturan perundangan tersebut harus memberikan ancaman hukuman bagi yang menolak memberikan data. Perbaikan Rencana Strategis BPS RI sudah memasukkan rencana peninjauan ulang Undang-undang no. 16 tahun 1997 Pedoman Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.



1. Institutional Environment

4. Adequacy of Resources: kecukupan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh BPS untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dalam hal ini, baik sarana prasarana maupun SDM BPS harus ditingkatkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

5. Quality Commitment: komitmen terhadap kualitas dapat ditinjau dari sejauh mana seluruh staf, proses, dan fasilitas digunakan untuk menjamin kualitas data yang objektif.

6. Statistical Confidentiality: sejauh mana kerahasiaan data para responden dijamin oleh BPS; baik responden perorangan, perusahaan, maupun lembaga.



2. Relevance

- 1. Scope and Coverage:** tujuan dari pengumpulan data dan target populasi yang menjadi sasaran pendataan, diskusi mengenai tingkat representasi data, harus ditetapkan dengan jelas.
- 2. Reference Period:** menjelaskan mengenai referensi waktu yang digunakan pada saat pengumpulan data.
- 3. Geographic Detail:** informasi mengenai level geografis yang dapat diwakili oleh data tersebut, misalnya data level provinsi atau kabupaten.
- 4. Main Output/Data Item:** mengukur apakah data benar-benar mengukur konsep-konsep yang direncanakan untuk diukur dan sesuai dengan tujuan penggunaan datanya.



2. Relevance

5. Classification and Statistical Standards: sejauh mana klasifikasi dan standar statistik diterapkan untuk mencerminkan konsep yang ditargetkan untuk diukur atau populasi yang menjadi sasaran.

6. Type of Estimates Available: hal ini merujuk pada jenis statistik yang tersedia untuk setiap data, misalnya bisa berupa angka indeks, perkiraan trend, seasonal adjusted data (data yang sudah disesuaikan secara musiman), dan data asli yang belum disesuaikan (original unadjusted data).

7. Other Cautions: informasi mengenai isu atau peringatan tertentu yang perlu diperhatikan ketika menggunakan data tersebut; misalnya harga yang tinggi pada saat krisis moneter.



3. Timeliness

Dimensi timeliness sepertinya sudah sangat jelas dimengerti oleh seluruh jajaran BPS. Dimensi ketepatan waktu ini harus diterapkan pada semua tahapan kegiatan statistik. Karena kegiatan tersebut berjalan beriringan. Ketika perencanaan dan pelaksanaan molor, sudah pasti pengolahan, analisis dan diseminasi ikut tertunda.

Ada dua aspek kunci untuk menilai dimensi timeliness, yaitu:

- 1. Timing:** hal ini berkaitan dengan time lag dari referensi waktu pengumpulan data dan kapan publikasi data tersebut. Tentunya lebih cepat lebih baik. Salah satu strategi di BPS saat ini adalah survei menggunakan tablet untuk mempercepat pemrosesan.
- 2. Frequency of Survey:** hal ini terkait dengan frekuensi pelaksanaan suatu survei. Apakah satu kali saja atau akan berulang, misalnya setiap triwulan. Maka untuk survei yang berulang harus ditentukan juga kapan rilis data untuk masing-masing periode.



4. Accuracy

1. Coverage Error: coverage error terjadi ketika ada sampel yang terlewat cacah atau tercacah dua kali. Hal ini sudah sering diantisipasi pada kegiatan BPS dengan pengaturan batas-batas blok sensus yang jelas. Namun tentunya harus tetap dijaga dalam kegiatan BPS selanjutnya.

2. Sample Error: sample error terjadi ketika sampel yang diambil ternyata tidak dapat mewakili target populasi. Misalnya underestimate atau overestimate. Sampai saat ini, sample error berada dalam penanganan BPS RI yang merancang dan mengevaluasi desain sampel.

3. Non-Response Error: untuk meminimalkan non-response error, tentunya harus dilakukan pendekatan-pendekatan kepada responden supaya bersedia memberikan data. Namun ketika non-response tidak dapat dihindari, harus dilakukan estimasi untuk memperhitungkan data yang tidak didapatkan tersebut. Estimasi non response error juga masih dalam penanganan BPS RI. BPS daerah bisa membantu meminimalkan non response error pada tahap pengumpulan data dengan pendekatan-pendekatan yang cocok dengan adat-istiadat di wilayah masing-masing.



4. Accuracy

4. Response Error: response error bisa terjadi bila responden dengan sengaja atau tidak memberikan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak lengkap. Untuk meminimalkan response error, maka setiap petugas sensus atau survei harus dibekali keahlian “probing” untuk bisa mendapatkan data yang sebenarnya dari responden.

5. Other Sources of Error: permasalahan lain yang dapat menurunkan tingkat akurasi juga harus dipertimbangkan. Misalnya kesalahan pada saat entri data. Editing, dan lain-lain.

6. Revisions to Data: perbaikan data yang diperlukan sebaiknya direncanakan, dengan menyatakan angka sementara dan angka tetap. Angka dapat direvisi bila ada kesalahan yang ditemukan setelah dirilis, namun tentunya harus diminimalkan.



5. Coherence

- 1. Changes to Data Items:** apakah data tersebut bisa didapatkan dalam bentuk time series misalnya 10 tahun, apakah data tersebut akan ada setiap saat, atau apakah ada perbedaan signifikan ketika data tersebut dikumpulkan di masa yang akan datang.
- 2. Comparison Across Data Items:** apakah data tersebut mampu dibandingkan dengan data lain untuk menghasilkan pemaknaan yang bermanfaat untuk analisis lebih lanjut?
- 3. Comparison with Previous Releases:** apakah data tersebut dapat dibandingkan dan mencerminkan perubahan yang konsisten dengan data yang sama yang dirilis pada periode sebelumnya? Misalnya angka IPM 2011 dan 2012.
- 4. Comparison with Other Products Available:** apakah data tersebut bisa disandingkan dengan data dari sumber lain; misalnya data kemiskinan BPS dan data kemiskinan dari sumber lain? Kalau tidak sama, bagaimana menjelaskan perbedaan tersebut?



6. Interpretability

Dimensi interpretability terutama diperlukan pada tahap diseminasi. Interpretability merujuk pada ketersediaan informasi untuk membantu pemahaman pengguna data, misalnya variabel yang digunakan, metadata, konsep, klasifikasi, dan ukuran akurasi.

Ada dua aspek untuk mengevaluasi dimensi ini:

- 1. Presentation of the Information:** bentuk presentasi data yang mudah dipahami dan penggunaan ringkasan analisis dapat digunakan untuk membantu menampilkan pesan penting dari suatu data.
- 2. Availability of Information Regarding the Data:** sebaiknya disediakan informasi kunci untuk membantu pengguna data dalam menafsirkan dan memahami data tersebut dengan benar, misalnya konsep, sumber data dan metodologi, pedoman interpretasi data, dan ukuran akurasi data.



7. Accessibility

Accessibility berkaitan langsung dengan kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi ketersediaan informasi yang relevan dan kemudian mengaksesnya dengan nyaman. BPS sudah menyediakan data yang mudah diakses dalam bentuk website. Namun harus terus dioptimalkan dengan mempercantik desain, mempermudah menu-menu untuk mengakses datanya, dan memutakhirkan isinya dengan data-data dan publikasi terbaru.

Ada dua kunci untuk mengevaluasi dimensi accessibility:

- 1. Accessibility to the Public:** sejauh mana suatu data tersedia untuk masyarakat umum. Selain akses umum, bisa juga disediakan akses data khusus dengan biaya tertentu.
- 2. Data Products Available:** hal ini merujuk pada ketersediaan data tertentu apakah publikasi atau tabel, formatnya, biayanya, dan data-data apa yang tersedia dalam suatu publikasi. Hal-hal tersebut harus bisa dijelaskan dengan baik kepada konsumen data.



Selamat Berkarya!

Drs. Abdul Halim, M.Si